

ABSTRACT

The handover of the authority of the central government to the local government as a form of decentralization in the unitary state in the field of spatial planning, especially green open space in the form of burial land in the Banyumas Regency area, can be said to have not been effective in utilization and management like other forms of green open space. This is because it is not in accordance with the application of spatial planning as a form of green open space because there are discrepancies in its application to regional regulations that are not in line with higher regulations. This research uses a statutory and conceptual approach method with normative juridical research specifications. Using secondary data sources are then analyzed using deductive methods. Based on the results of the study, it can be concluded that there are deviations in legal norms in the content material for the management of burial land in Article 5 paragraph (3) of Banyumas Regency Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning Burial Place Management which is contrary to Chapter II of the Provision of Green Open Space in Urban Areas in Green Open Spaces certain functions in Cemeteries listed in the Regulation of the Minister of Public Works Number 5 of 2008 concerning Guidelines for Provision and Utilization of Green Open Space in Urban Areas.

Keywords: Decentralization, Green Open Space, Burial Land.

ABSTRAK

Penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk desentralisasi dalam negara kesatuan di bidang penataan ruang khususnya ruang terbuka hijau dalam bentuk taman pemakaman umum di wilayah Kabupaten Banyumas dapat dikatakan belum efektif dalam pemanfaatan dan pengelolaan sebagaimana bentuk ruang terbuka hijau lainnya. Hal itu disebabkan belum sesuai dengan penerapan penataan ruang sebagaimana wujud dari ruang terbuka hijau karena terdapat ketidaksesuaian dalam penerapannya pada peraturan daerah yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan spesifikasi penelitian yuridis normatif. Menggunakan sumber data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan terdapat penyimpangan norma hukum dalam materi muatan pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman yang bertentangan dengan Bab II Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dalam Ruang Terbuka Hijau Fungsi Tertentu pada Pemakaman yang tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkotaan.

Kata kunci: *Desentralisasi, Ruang Terbuka Hijau. Taman Pemakaman Umum.*